

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Sejarah DPD PDI Perjuangan Jawa Barat

Bahwa PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik. Kelima partai politik tersebut yaitu :

- 1) Partai Nasional Indonesia (PNI)
- 2) Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
- 3) Partai Katolik
- 4) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
- 5) Murba

Setelah diskusi melalui berbagai tokoh-tokoh partai bertemu dan mulai mendiskusikan gagasan. Pertemuan kemudian berlanjut pada tanggal 27 Februari 1970 Presiden Soeharto mengundang lima partai politik yang dikategorikan kelompok pertama yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) dan Murba. Ide pengelompokan yang dilontarkan Soeharto menjadi perhatian masyarakat umum dan ditengah-tengah proses pengelompokan tersebut berkembang rumor yang sangat kuat isu pembubaran partai-partai politik jika tidak dicapai kesepakatan untuk mengadakan pengelompokan sampai batas waktu 11 Maret 1971 karena partai sangat lamban, mulai muncul gerakan di sejumlah daerah yang paling terkenal adalah di Jawa Barat. Panglima daerah di Jawa Barat pada waktu adalah Jenderal Darsono melakukan bulldoser secara besar-besaran ke partai di Jawa Barat. Muncul gagasan tentang dwi partai. Partai yang cuma dua di Indonesia. Dan korban paling utama pada waktu itu adalah Partai Nasional Indonesia.

Pada tanggal 13 Januari 1973 Majelis Pimpinan Partai (MPP) terbentuk, Sabtu 14 Januari 1973 jam 01.20 pagi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berhasil menyusun struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sampai terselenggaranya Kongres Nasional. Susunan kepengurusan DPP PDI sebagai berikut :

- 1) Majelis Pimpinan Pusat (beranggotakan 25 orang)
- 2) Dewan Pimpinan Pusat (beranggotakan 11 orang)

DPP PDI bersama Tim 10 pada tanggal 8-10 Juni 1973 di Cibogo Bogor berhasil menyelesaikan AD/ART PDI dan telah disahkan dalam rapat DPP PDI tanggal 26 Juli 1973 serta dikukuhkan dalam rapat MPP PDI di kediaman Hasyim Ning pada tanggal 4 Agustus 1973. Sementara Piagam dan Program Perjuangan Partai dikukuhkan dalam rapat MPP PDI tanggal 19-20 September 1973. Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah organisatoris dalam rangka eksistensi partai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan tersebut dimasukkan di dalam AD-ART PDI. Meskipun pemerintahan sudah berganti, namun yang diakui oleh Pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istoran Senayan Jakarta.

Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya keinginan masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalanannya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Ke – 4. Untuk pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan, pengurus DPP PDI Perjuangan memutuskan melaksanakan Kongres I PDI Perjuangan meskipun masa bakti kepengurusan DPP sebelumnya baru selesai tahun 2003. Salah satu alasan diselenggarakannya Kongres ini adalah untuk memantapkan konsolidasi organisasi Pasca terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden RI. Kongres I PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret – 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa Semarang-Jawa Tengah. Menjelang Kongres I PDI

Perjuangan, sudah muncul calon-calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, nama yang muncul antara lain Dimiyati Hartono yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, kemudian muncul pula nama Eros Jarot yang sempat menggalang DPC-DPC untuk mendukungnya. Di dalam pemandangan umum Cabang-Cabang, dari 243 DPC, hanya 2 DPC yang mengusulkan nama lain yaitu DPC Kota Jayapura dalam pemandangan umumnya mengusulkan 3 orang calon Ketua Umum yaitu Megawati, Dimiyati Hartono dan Eros Jarot, kemudian DPC Kota Banjarmasin mengusulkan Eros Jarot sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Kongres I PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan karena 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Setelah Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Ke – 5 menggantikan KH Abdurahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI. Diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke – 5 membawa perubahan pada sikap politik PDI Perjuangan dan cap sebagai partai penguasa melekat di PDI Perjuangan. Meski sebagai partai penguasa, PDI Perjuangan ternyata tidak mampu meraih kemenangan di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara di urutan kedua dengan 109 kursi di DPR. Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 28 – 31 Maret 2005 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar Bali, tempat dimana Kongres V PDI diselenggarakan pada tahun 1998. Kongres ini selesai 2 hari lebih cepat dari yang dijadwalkan yaitu 28 Maret – 2 April 2005.

Menjelang Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan, sudah banyak muncul nama-nama yang akan maju sebagai calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan antara lain Guruh Soekarnoputra yang digagas oleh Imam Mundjiat Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Laksamana Sukardi, Roy BB Janis, Arifin Panigoro dan Sophan Sophiaan. Masing-masing calon tersebut giat melakukan penggalangan kekuatan di daerah. Disamping itu kelima calon tersebut beberapa kali mengadakan pertemuan-pertemuan di beberapa hotel di Jakarta salah satunya pertemuan di Sahid Jaya Hotel. Di kemudian hari kelima calon ini bergabung menjadi satu dalam satu wadah yang dinamakan “Kelompok Gerakan Pembaruan PDI

Perjuangan” yang mengusung satu nama calon Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yaitu Guruh Sukarno Putra.

Di dalam sidang paripurna pertama, sidang sempat ricuh saat pembahasan tata tertib yang diikuti beberapa peserta walk out dari arena sidang. Akhirnya sidang paripurna tetap berlangsung setelah Ir. Sutjipto selaku pimpinan sidang mengajukan penawaran kepada peserta yang menolak Pasal 7 tata tertib untuk berdiri dan yang menyetujui tetap duduk, ternyata dari 1822 peserta hanya beberapa orang yang berdiri dan sidang dilanjutkan dan akhirnya memilih kembali Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden Republik Indonesia.

1.1.2 Visi dan Misi

a) Visi

Keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai.

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah :
Partai adalah:

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b) Misi

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8,9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

- a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

- a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- c. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
- d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan

- e. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

- a. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, LembagaLembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
- c. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
- f. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10, Partai mempunyai tugas:

- a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
- c. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
- e. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- f. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;

- g. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- h. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

1.1.3 Logo Organisasi

Logo adalah bagian utama dari sebuah organisasi. Logo merupakan simbol yang menggambarkan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Di balik sebuah logo, ada identitas serta filosofi dari organisasi.



Gambar 1.1

Logo PDI Perjuangan

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Logo_PDI-Perjuangan_Transparent.png

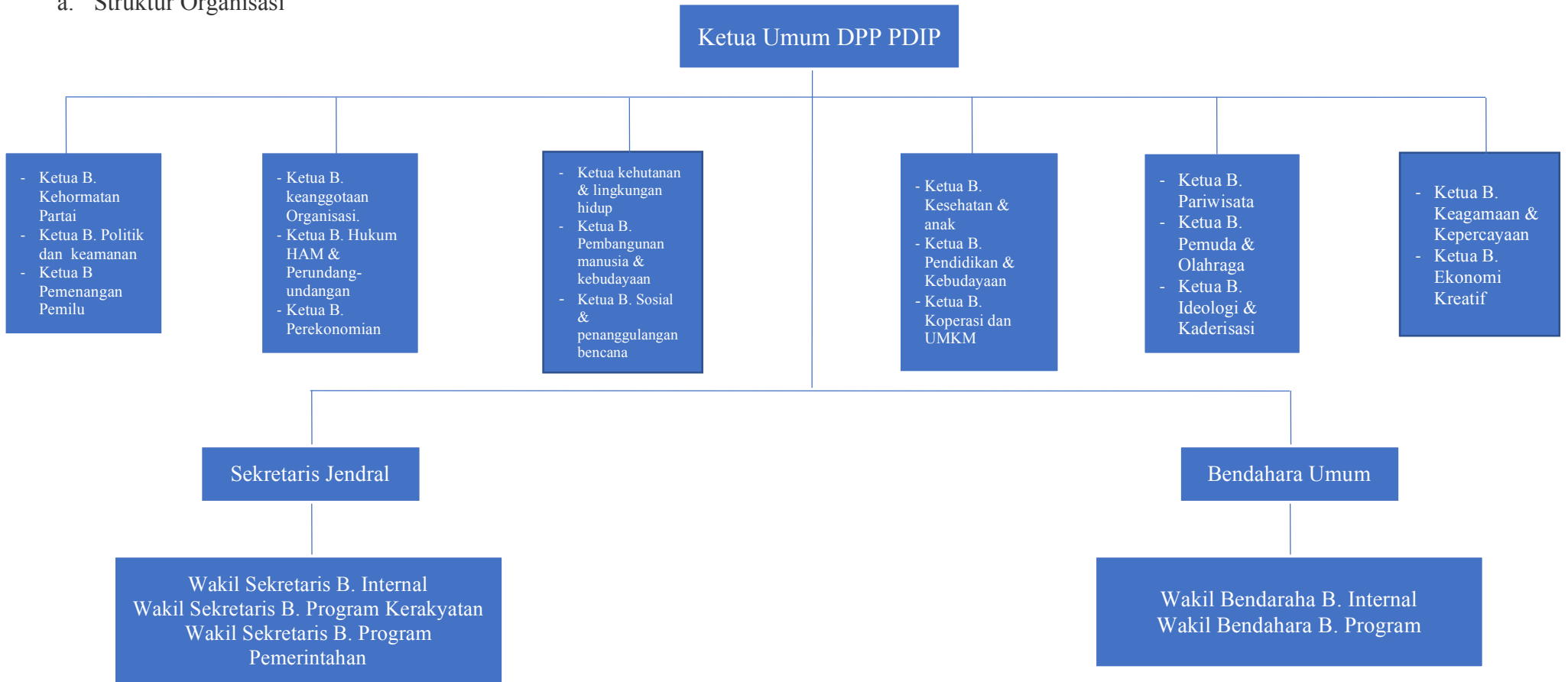
Filosofi Logo:

- a) Logo PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih.
- b) Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat.
- c) Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang.
- d) Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran
- e) Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa terputus

1.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

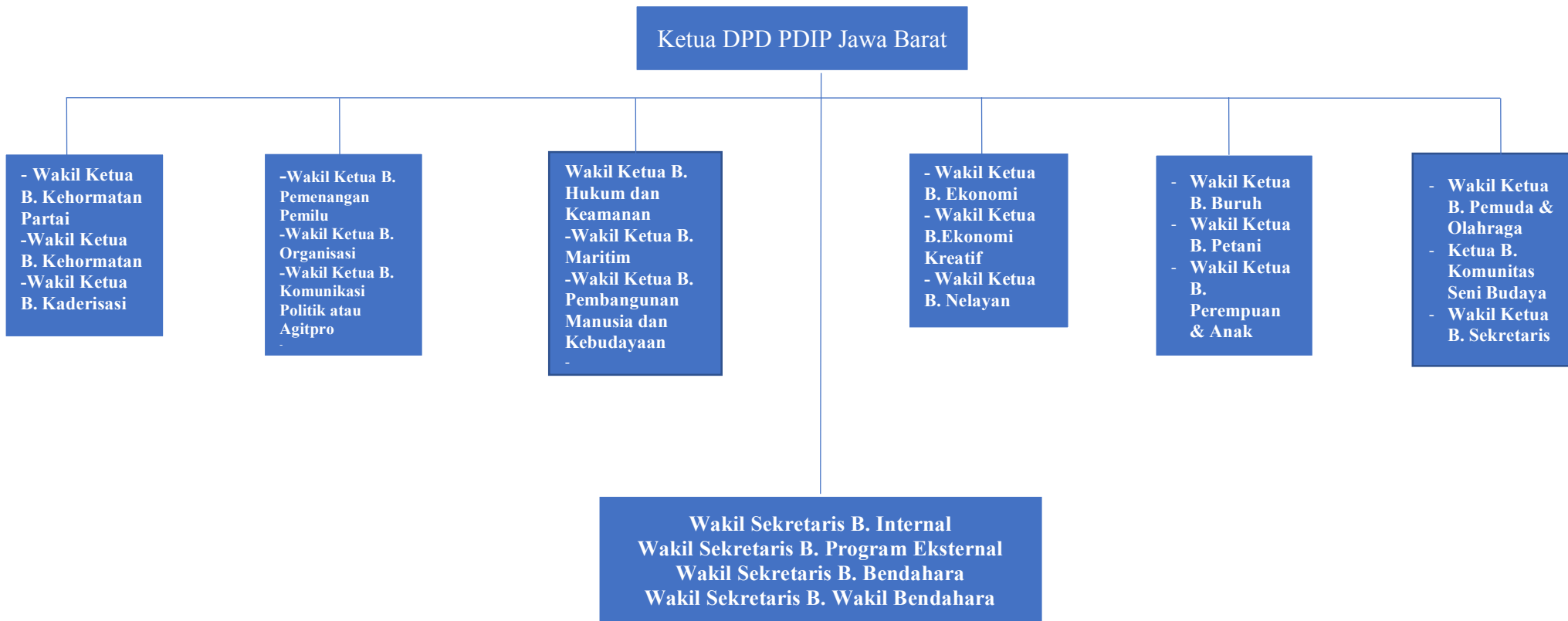
Struktur organisasi dari DPD PDI Perjuangan Jawa Barat sama seperti dengan struktur organisasi dari DPP PDI Perjuangan. Hal itu disebabkan karena struktur organisasi DPP itu sebagai acuan dari DPD PDI Perjuangan. Struktur organisasi dari DPP dan DPD PDI Perjuangan dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3 sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi



Gambar 1.2 Struktur Organisasi DPP PDI Perjuangan

Sumber: www.pdiperjuangan.id



Gambar 1.3 Struktur Organisasi DPD PDI Perjuangan

Sumber : www.pdiperjuangan.id

b. Uraian Tugas DPP dan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat

- a) Ketua Umum : sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai.

Ketua Umum dibantu oleh Ketua-Ketua Bidang yang terdiri dari:

- 1) Bidang Internal, yang fungsi dan tugasnya mencakup:
 - (a) Kehormat Partai;
 - (b) Ideolo dan Kaderisasi;
 - (c) Organisasi; dan
 - (d) Pemenangan Pemilu.
- 2) Bidang Pemerintahan, yang fungsi dan tugasnya mencakup:
 - (a) Politik dan Keamanan;
 - (b) Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian;
 - (c) Pembangunan Manusia dan kebudayaan;
 - (d) Kemaritiman, Energi dan Sumber Daya Minera
 - (e) Agraria, Kehutanan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
 - (f) Hukum, HAM dan Perundang-undangan.
- 3) Bidang Kerakyatan, yang fungsi dan tugasnya mencakup:
 - (a) Buruh, Tani, dan Nelayan;
 - (b) Kesehatan, Perempuan dan Anak;
 - (c) Pemuda dan Olahraga;
 - (d) Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - (e) Pendidikan Nasional;
 - (f) Pariwisata;
 - (g) Ekonomi Kreatif;
 - (h) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
 - (i) Sosial dan Penanggulangan Bencana.

- b) Ketua - Ketua Bidang Internal : mempunyai tugas umum menyusun konsep kebijakan dan program strategis Partai yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penguatan Partai.

- c) Ketua - Ketua Bidang Pemerintahan : mempunyai tugas umum menyusun konsep kebijakan dan program strategis Partai yang dilaksanakan Partai untuk diperjuangkan menjadi kebijakan Pemerintah.
- d) Ketua - Ketua Bidang Kerakyatan: mempunyai tugas umum menyusun konsep kebijakan dan program strategis Partai yang berkaitan langsung dengan kehidupan rakyat.
- e) Sekretaris Jenderal adalah DPP Partai yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan manajemen administrasi kepartaian, merancang peraturan dan keputusan Partai, dan menjabarkan kebijakan Ketua Umum Partai dan/atau DPP Partai dalam program Partai, baik secara internal maupun eksternal.
- f) Wakil - Wakil Sekretaris Jenderal adalah DPP Partai yang menjadi bagian dan fungsi Sekretaris Jenderal dengan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
- g) Bendahara Umum adalah DPP Partai yang diberikan tugas untuk merancang, menghimpun dan mengelola, serta bertanggung jawab atas keuangan dan perbendaharaan Partai.
- h) Wakil - Wakil Bendahara Umum adalah DPP Partai yang menjadi bagian dan fungsi Bendahara Umum, yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Politik adalah salah satu hal yang penting bagi suatu negara, karena dengan adanya politik masyarakat mampu mengetahui tata cara berpolitik yang benar, lalu masyarakat dapat berfikir demokratis agar tidak terjadi kecurangan di dalamnya, masyarakat juga mampu menunjukkan bagaimana pola pikir dalam suatu negara bisa diwakili oleh pemimpin dari suatu partai politik yang nantinya bisa menjadi pemimpin negara, masyarakat juga mampu mengetahui berbagai macam ciri – ciri pemimpin serta mereka mampu memilih pemimpin yang tepat untuk negaranya.

Menurut Budiardjo (1982:8) dalam Situmorang (2016), politik adalah macam – macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem yang ada serta melaksanakan tujuannya. Sedangkan definisi bisnis menurut (Griffin, 2007: 4) dalam dalam Situmorang (2016) adalah organisasi

yang dapat menyediakan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Perusahaan sebagai organisasi bisnis memiliki banyak faktor yang mempengaruhi dari luar organisasi yang disebut lingkungan. Lingkungan luar dibedakan menjadi lingkungan tugas (*task environment*) dan lingkungan umum. Salah satu lingkungan tak langsung (*societal environment*) yang mempengaruhi organisasi bisnis adalah lingkungan politik. Lingkungan lainnya adalah lingkungan hukum, lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial.

Tentu saja lingkungan politik mempunyai pelaku politik yang bisa menjalankan untuk mencapai tujuannya masing – masing. Pelaku politik juga pasti membutuhkan pelaku bisnis atau sebaliknya. Pelaku politik pasti bernaung kepada partai politik. Partai politik dalam Situmorang (2016) adalah organisasi nirlaba namun harus mempunyai serta memerlukan uang atau dana untuk menggerakkan roda organisasinya. Kebutuhan dana tersebut diperoleh dari para donator baik dari anggota (internal) partai maupun dari simpatisan (eksternal) partai. Sebaliknya, para pelaku bisnis juga membutuhkan pelaku politik dalam menjalankan suatu bisnisnya. Sebagian pelaku politik duduk atau menjadi anggota Dewan mulai dari tingkat DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Dapat disimpulkan bahwa politik sangat berpengaruh terhadap bisnis.

Pelaku bisnis berharap bahwa Undang-Undang ataupun peraturan dibawahnya yang dibuat Pemerintah bersama anggota Dewan bersifat ”kondusif” bagi perusahaannya. Disinilah yang dikenal istilah mulai dari lobi politik sampai dengan cara menyogok. Kaitan yang keempat, politikus (politician) yang juga (asalnya) dari pebisnis (businessman). Hal seperti ini terdapat di banyak negara termasuk Indonesia.

Peneliti memilih Partai PDI Perjuangan sebagai objek penelitian karena PDI Perjuangan adalah salah satu partai terbesar yang ada di Indonesia. PDI Perjuangan juga terbentuk dari beberapa gabungan partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Menurut peneliti dengan adanya gabungan dari berbagai macam Partai justru mempunyai makna tersendiri bagi PDI Perjuangan. Oleh karena itu menurut peneliti PDI Perjuangan sangat cocok menjadi objek penelitian.

Politik membutuhkan organisasi yang mampu menampung berbagai macam aspirasi dari masyarakat dan biasanya disebut sebagai partai politik. Partai politik adalah suatu organisasi politik yang memiliki nilai dan cita – cita yang sama dalam

mencapai tujuan. Dalam partai politik dibutuhkan berbagai sumber daya salah satunya adalah sumber daya manusia. Menurut Syamsuddinnor dalam Arifin (2016:1) sumber daya manusia adalah salah satu modal paling utama dalam suatu organisasi, karena dapat memberikan kontribusi yang tidak ternilai dalam melakukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus mampu untuk mengatur serta mengelola sumber daya manusia.

Menurut Fahmi (2015:1) manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut *human resource management* adalah sebuah aktivitas disuatu organisasi untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja secara efektif. Menurut Badriyah (2013:15) manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bagian dari ilmu manajemen yang fokus terhadap pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Dalam manajemen sumber daya manusia terdapat beberapa cara untuk membentuk suatu karakter seseorang sehingga membentuk sebuah loyalitas. Menurut Hasibuan (2013:58) loyalitas adalah unsur yang digunakan untuk menilai pengurus berdasarkan kesetiaan terhadap pekerjaannya bisa melalui jabatannya yang dimiliki di dalam organisasi. Kesetiaan ini dilihat dari kesediaan pengurus menjaga dan membela organisasi didalam maupun diluar pekerjaan dari hal-hal yang dapat merugikan organisasi.

Dalam tahap pertama penulis melakukan penelitian dan observasi awal mengenai loyalitas pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 20 orang pengurus yang menjadi sampel, dikarenakan mereka tidak hadir pada jam kerja dan dapat dilihat dari Tabel 1.1, sebagai berikut:

TABEL 1.1
HASIL RESPONDEN PADA VARIABEL LOYALITAS

No	Uraian Pertanyaan	Pilih Jawaban		Total Pengurus
		Tingkat perasaan		
		Setuju	Tidak Setuju	
1.	Saya sudah mentaati segala aturan yang ada di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat	20 pengurus	0 pengurus	20
2.	Saya pernah memegang tanggung jawab besar pada pilkada di Jawa Barat	20 pengurus	0 pengurus	20
3.	Saya selalu berinisiatif bekerjasama ketika saya dipasangkan dengan tim baru untuk melakukan proses pilkada di Jawa Barat	15 pengurus	5 pengurus	20
4.	Saya selalu menginginkan bekerjasama dengan tim	15 pengurus	5 pengurus	20
5.	Saya pernah membuktikan kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat bahwa saya sangat berpotensi ketika saya mendapatkan kepercayaan (ditanyakan lagi apa penyebabnya lalu diuraikan)	11 pengurus	9 pengurus	20
6.	Saya selalu bersikap baik kepada seluruh pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat	20 pengurus	0 pengurus	20
7.	Saya pernah mempunyai kurang menyenangkan terhadap sesama pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat	15 pengurus	5 pengurus	20
8.	Saya selalu senang ketika diberikan wewenang yang berbeda dari wewenang sebelumnya	17 pengurus	3 pengurus	20
Total		133 pengurus	27 pengurus	160
Presentase		83%	17%	100%

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat loyalitas di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat masih belum maksimal. Karena masih terlihat dari jumlah presentase yang menjawab tidak setuju sebesar 17% pengurus. Dilihat pada nomor 7 dengan pernyataan pengurus pernah mengalami hal buruk ketika bekerja di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, maka secara otomatis loyalitas yang ada di DPD PDI Perjuangan masih rendah. Oleh karena itu manajemen sumber daya manusia harus mampu membentuk suatu loyalitas kepada masing – masing pengurus yang ada di

DPD PDI Perjuangan Jawa Barat dengan baik melalui berbagai dimensi loyalitas. Lalu sebelum loyalitas terbentuk, seseorang harus memiliki berbagai macam sifat atau karakter yang tepat agar loyalitas terbentuk dengan sendirinya.

Dimensi yang terdapat dalam mengukur loyalitas yang terdapat pada individu dan dikemukakan oleh Siswanto dalam Soegandhi et al (2013:03) yang menitikberatkan pada pelaksanaan kerja yang dilakukan karyawan antara lain:

- 1) Taat pada peraturan. Setiap kebijakan diterapkan dalam organisasi untuk memperlancar dan mengatur jalannya pelaksanaan tugas oleh manajemen ditaati dan dilaksanakan dengan baik.
- 2) Tanggung jawab pada suatu organisasi. Karakteristik dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya mempunyai konsekuensi yang dibebankan anggota. Kesanggupan anggota untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan kesadaran akan setiap risiko pelaksanaan tugasnya akan memberikan pengertian tentang keberanian dan kesadaran bertanggung jawab terhadap risiko atas apa yang telah dilaksanakan.
- 3) Kemauan untuk bekerjasama. Bekerjasama dengan orang-orang dalam suatu kelompok atau organisasi akan memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh orang-orang secara individual.
- 4) Rasa memiliki. Adanya rasa ikut memiliki anggota terhadap organisasi akan membuat anggota memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap suatu organisasi sehingga pada akhirnya akan menimbulkan loyalitas demi tercapainya tujuan organisasi.
- 5) Hubungan antar pribadi. Anggota yang mempunyai loyalitas kerja tinggi mereka akan mempunyai sikap fleksibel ke arah tata hubungan antara pribadi. Hubungan antar pribadi ini meliputi: hubungan sosial diantara anggota, hubungan yang harmonis antara ketua, wakil dan anggota, situasi kerja dan sugesti dari anggotanya.
- 6) Kesukaan terhadap pekerjaan. Perusahaan harus dapat menghadapi kenyataan bahwa anggota setiap hari datang untuk bekerjasama sebagai manusia seutuhnya dalam hal melakukan pekerjaan yang akan dilakukan dengan senang hati seperti, keunggulan karyawan dalam bekerja dan karyawan tidak pernah menuntut apa yang diterimanya diluar gaji pokok.

Dalam dimensi loyalitas terdapat beberapa *point* dan salah satunya adalah rasa memiliki atau *sense of belonging*. Menurut Hagerty & Patusky dalam Kamalie (2016:7) mengemukakan bahwa *sense of belonging* adalah sebagai pengalaman yang melibatkan kepribadian setiap individu dalam sistem maupun lingkungan, sehingga setiap individu merasa dirinya menjadi bagian integral dari sistem dan lingkungan. Adapun hasil pra kuesioner penilaian *sense of belonging* di DPD PDI Perjuangan dapat dijelaskan di Tabel 1.2 sebagai berikut:

TABEL 1.2
HASIL RESPONDEN PADA VARIABEL *SENSE OF BELONGING*

No	Uraian Pertanyaan	Pilih Jawaban		Total Pengurus
		Tingkat Perasaan		
		Setuju	Tidak Setuju	
1.	Saya selalu merasa dihargai keberadaannya selama berada di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat	15 pengurus	5 pengurus	20
2.	Saya selalu merasakan bahwa lingkungan kerja yang ada di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat selalu menerima anda	14 pengurus	6 pengurus	20
3.	Saya sangat bangga menjadi salah satu pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat	12 pengurus	8 pengurus	20
4.	Saya selalu mempunyai target kerja dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai (digali informasinya)	9 pengurus	11 pengurus	20
Total		50 pengurus	30 pengurus	80
Presentase		65%	35%	100%

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil pra kuesioner tersebut terdapat 35% dari 20 responden yang masih menjawab tidak setuju. Maka secara garis besar peneliti mampu menyimpulkan bahwa *sense of belonging* yang ada di DPD PDI Perjuangan belum terbentuk dengan maksimal. Ketika *sense of belonging* belum ada dalam benak seseorang maka tidak akan menciptakan sikap loyalitas terhadap sesama pengurus hingga pekerjaannya. Adapun dimensi dari *sense of belonging* menurut Hagerty & Patusky dalam Afryana (2017) *Sense of belonging* terbagi menjadi dua dimensi yaitu :

- 1) *Valued Involvement*

Valued Involvement adalah pengalaman yang bisa dihargai, dibutuhkan, atau diterima serta didukung dalam lingkungannya sendiri.

2) *Fit*

Fit adalah suatu persepsi bahwa karakteristik individu mengartikulasikan dengan sistem atau lingkungan dimana dia berada. Pada intinya individu memiliki rasa menjadi bagian dari kelompok atau lingkungannya. Pernyataan ini selaras dengan pengertian *Sense of belonging* menurut (Budi Antono *Corporate Organization Development Manager* dalam situs *academia.edu*) yaitu suatu keberanian dalam bentuk inisiatif yang mampu mengambil tanggung jawab dan risiko serta keinginan berbagi. *Sense of belonging* juga bisa mengubah bentuk keterikatan seseorang dengan organisasi dari sekedar yang bernuansa bisnis hingga menjadi semacam keterikatan batin.

Menurut penulis, *sense of belonging* sangat berperan penting untuk membentuk suatu loyalitas seseorang karena tanpa adanya hal tersebut maka loyalitas bisa terbentuk namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa loyalitas pengurus di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat belum terbentuk secara maksimal. Penerapan *sense of belonging* memberikan dampak terhadap loyalitas pengurus agar loyalitas bisa meningkat dengan sendirinya, karena hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana “PENGARUH *SENSE OF BELONGING* TERHADAP LOYALITAS INDIVIDU PENGURUS DPD PDI PERJUANGAN JAWA BARAT”.

1.3 Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana tingkat *sense of belonging* individu pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat?
- 2) Bagaimana tingkat Loyalitas pada individu pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat?
- 3) Seberapa besar pengaruh *sense of belonging* terhadap Loyalitas pada pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana tingkat *sense of belonging* pada individu pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tingkat loyalitas pada individu pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *sense of belonging* terhadap loyalitas pada pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat

1.5 Kegunaan Penelitian

- 1) Bagi Perusahaan / Organisasi
Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi atau bahan masukan tambahan bagi perusahaan dalam menyikapi masalah sumber daya manusia yang menyangkut *sense of belonging* terhadap loyalitas pengurusnya.
- 2) Bagi Karyawan / Individu Pengurus
Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih banyak kepada pengurus dalam suatu organisasi tentang *sense of belonging* agar menumbuhkan rasa loyalitas.
- 3) Bagi Peneliti
Kegunaan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai manajemen sumber daya manusia secara nyata khususnya menyangkut tentang *sense of belonging* untuk menumbuhkan rasa loyalitas di suatu organisasi.
- 4) Bagi Akademisi
Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia khususnya menyangkut tentang *sense of belonging* untuk menumbuhkan rasa loyalitas.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Jalan Pelajar Pejuang 45 no 1, kota Bandung, Jawa Barat 42063. Objek penelitian yang akan diteliti adalah seluruh anggota DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

1.6.2 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai September sampai dengan 2018. Lokasi penelitian bertempat di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yang beralamat di Jalan Pelajar Pejuang 45 no 1, kota Bandung, Jawa Barat 42063.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan dan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I berisi tentang tinjauan terhadap objek studi, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II berisi teori – teori yang mendasari penelitian dan kerangka teori

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian, tahapan penelitian, menentukan posisisi dan sampel, metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai tipe – tipe responden yang dilihat dari berbagai aspek serta membahas dan menjawab rumusan masalah serta hasil perhitungan analisis data yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V berisi tentang kesimpulan dari seluruh penelitian serta saran dan masukan yang berguna dimasa yang akan datang.

